

ABSTRACT

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN

Characteristic of Local Government to Financial Performance

By : Danny Mukuan

Local financial problem is one of the main concern in this research. The local government has important role in order to control and manage local finance, therefore in “UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” stated that implementation of regional autonomy through provision of resource based on Central Government decision, “desentralisasi”, “dekonsentrasi” and “tugas pembantuan”, the financial balancing between Central Government and local Government has to be regulated based on clear competency, role and duty in the government.

I

PENDAHULUAN

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia (Adi, 2005). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya bertumpu pada pemerintah pusat (Kuncoro, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2010) mengungkapkan bahwa adanya ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dengan pulau-pulau lain atau antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Bruijn (2002) dan Greiling (2005) pada pemerintah daerah di Jerman, serta Nolan, Moore, dan Chan (2004) di U. S. A dan Kanada. Di Indonesia, penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Hamzah (2009) yang meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan rasio efisensi dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan belanja pembangunan (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Halim (2002) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali.

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur /Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran b) Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan *good governance* (Sadjiarto, 2000). Hal ini dikarenakan melalui laporan keuangan maka unsur akuntabilitas dalam mencapai *good governance* dapat terpenuhi (Wiratraman, 2009). Pada perkembangannya, usaha pemerintah dalam mencapai *good governance* masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari fenomena yang terjadi pada tahun 2004 dimana terjadi korupsi secara massal dengan dalih studi banding, proyek pengurusan, dan manipulasi anggaran (Wiratraman, 2009). Belakangan ini, berkembanglah tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas yang tidak hanya sekedar dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, namun masyarakat menginginkan adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah (Sadjiarto, 2000).

Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998).

Dengan berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapannya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di suatu daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (Wikipedia.com, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh IRIS

Indonesia bekerjasama dengan Syahrudin dan Taifur, Werry Darta (2002) mengungkapkan DPRD memiliki peranan yang besar dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya sehingga dapat mencapai kinerja yang diinginkan.

Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat terlihat dengan adanya fakta bahwa pemerintah daerah masih mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal karena belanja aparaturnya belum dapat dibiayai oleh diri sendiri. Hal ini menimbulkan wacana di pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan yang baik melalui terciptanya *good governance*. Penelitian yang dilakukan Sadjiarto (2000) mengungkapkan bahwa dengan tercapainya *good governance* maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) meneliti mengenai pengaruh PAD dan belanja pembangunan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah PAD dan belanja pembangunan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pada sektor swasta, penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan oleh Ulupi (2005) dan Hasibuan (2009). Dalam penelitiannya, Hasibuan (2009) menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor pemerintahan, dimana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Poerwadarminta, 2006). Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sekaran (2000), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variable atau lebih.

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006).

Menurut Cooper (2009) populasi adalah total kumpulan elemen atau unsur yang kita harapkan membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota seluruh Indonesia pada tahun 2015 Total populasi adalah 333 kabupaten/kota di bawah 33 propinsi.

Pengambil sampel dapat ditetapkan sebanyak 125 responden.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2015 serta data non keuangan, seperti jumlah anggota DPRD. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, regresi berganda,

III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan populasi, sampel dan hasil pengolahan data serta analisis yang meliputi diskripsi data, pengolahan data, dan pengujian hipotesis serta pembahasan hasil analisis. Pengujian data dengan model analisis *multiple regression* menggunakan *software SPSS release 17.0*.

Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini dijelaskan dengan ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue*. Hasil pengujian dalam penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa hipotesis pertama, ketiga, dan kelima dalam penelitian ini dapat diterima.

Penelitian ini menggunakan variabel kemakmuran (*wealth*) yang diukur dengan menggunakan total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penggunaan uji regresi berganda dengan menggunakan metode *backward* maka dapat terlihat bahwa kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun hal ini dapat diterima mengingat masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap transfer dana dari pemerintah pusat (Hadi, Hendri, dan Inapty, 2009).

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sulitnya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber PAD membuat besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Kelly (2010) mengungkapkan bahwa pada negara berkembang seperti di Indonesia, pemerintah daerah cenderung untuk mengandalkan transfer dana yang dilakukan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masih besarnya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga berdampak kepada besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal antar daerah merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan

peran dari PAD. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2005) dan Bhinadi (2010) yang menunjukkan terdapat kesenjangan antar daerah di Indonesia.

Pada variabel ukuran legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diukur dengan jumlah total anggota DPRD menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan para anggota DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah belum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat, DPRD diharapkan lebih peka dan proaktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Buruknya peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat dibuktikan dengan banyaknya anggota DPRD daerah maupun provinsi yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi. Berdasarkan berita yang dimuat pada Tempointeraktif.com pada tanggal 28 Juli 2010 bahwa Kejaksaan sedang melakukan pemeriksaan sebanyak 101 kasus selama satu semester atas adanya dugaan korupsi di Jawa Tengah yang melibatkan anggota DPRD. Hal lain yang memperburuk kinerja DPRD dalam perannya mengawasi kinerja pemerintah daerah adalah kurang disiplinnya anggota DPRD dalam kehadiran. Pada situs resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bandar Lampung menyebutkan bahwa terdapat 10 anggota DPRD Bandar Lampung yang tidak menghadiri rapat secara tiga kali berturut-turut. Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan diatas, buruknya peran pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya pengaruh ukuran DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Koefisien regresi untuk variabel *leverage* adalah positif. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin besar *leverage* suatu pemerintah daerah maka kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan semakin baik. Atau dengan kata lain, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Penelitian yang dilakukan Cohen and Kaimenakis (2008) mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki *leverage* tinggi akan mendapat pengawasan lebih dari kreditor. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan kreditor terhadap pemerintah daerah adalah melalui pengawasan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatannya, entitas akan membutuhkan persetujuan kreditor atas kegiatan yang akan dilakukannya (Haniffa and Cooke, 2005). Pengawasan kreditor terhadap pemerintah daerah akan berdampak terhadap semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah harus dapat menjamin dan meyakinkan kreditor bahwa dana yang dipinjamnya dapat terbayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Patrick (2007) yang mengungkapkan bahwa kreditor akan mengawasi aktivitas pemerintah daerah agar mendapat jaminan bahwa pemerintah daerah akan membayar atas dana yang dipinjamnya.

Berdasarkan data yang diolah dari koefisien regresi untuk variabel ukuran (*size*) adalah positif yang mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan Cooke (1992) mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melakukan pengungkapan. Besarnya tuntutan publik untuk melakukan pengungkapan akan berdampak pula pada tuntutan kinerja yang dimiliki entitas tersebut. Pemerintah daerah akan cenderung memberikan *good news* dalam mengungkapkan laporan keuangannya. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ramasamy, Ong, dan Yeung (2005) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran (*size*) terhadap kinerja suatu entitas. Sementara itu, tanda koefisien regresi untuk variabel *intergovernmental revenue* adalah positif. Tanda koefisien ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *intergovernmental revenue* semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. *intergovernmental revenue* merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Patrick, 2007). Besarnya *intergovernmental revenue* menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Terlaksananya pemerintahan dapat berimplikasi yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer dana tersebut maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung bukti empiris penelitian Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) bahwa semakin besar transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik.

IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan masih kecilnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dengan masih buruknya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Banyaknya anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan sedikitnya kehadiran anggota DPRD dalam menghadiri rapat diduga sebagai penyebab buruknya pengawasan DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan semakin besarnya *leverage* pemerintah daerah maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan semakin ketat. Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya membutuhkan persetujuan dari kreditor. Persetujuan tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat menjamin dan meyakinkan kreditor bahwa dana yang dipinjam pemerintah daerah tersebut dapat terbayarkan. Pengawasan ketat yang dilakukan oleh kreditor akan berdampak pada semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah

maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut.

Intergovernmental revenue juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksananya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bukti yang didapat dalam penelitian ini bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Bukti ini mendasari simpulan bahwa semakin besar *intergovernmental revenue* maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

B. Saran

Hasil simpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah di Indonesia khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya. Terdapatnya pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah diharapkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran (*size*) yang besar untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari internal sehingga kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut dapat lebih baik. *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diharapkan dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat digunakan dengan baik, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga tercipta pembangunan dan berdampak pada kegiatan ekonomi di daerah tersebut sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, peneliti juga mengajukan saran kepada masyarakat dan DPRD sebagai badan yang memperjuangkan kepentingan rakyat untuk lebih dapat meningkatkan kesadaran dan pengawasan terkait kinerja pemerintah. Dengan semakin

baik kinerja pemerintah daerah maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik sehingga akan berdampak terciptanya *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeedding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Anzar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dipublikasikan.
- Ashkarany, Davood. 2006. *Characteristics of Adopters and Organizational Changes*. Thunderbird International Business Review, Vol. 48 No. 5: 705-725.
- Baber, William R, Gore, Angela K, Rich, Kevin T, and Zhang, Jean X. 2010. *An Empirical Investigation of Accounting Restatements and Governance in the Municipal Context*. Working Paper Series. SSRN August.
- Bhinadi, Ardhito. 2003. *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Pulau Jawa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No. 1: 39-48. Juni 2003.
- Bruijn, Hans De. 2002. *Performance Measurement in The Public Sector: Strategies to Cope With The Risk of Performance Measurement*. Emerald Insight.
- Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. and Williamson, J. 1998. *The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care organization management*. Journal of Health-care Management.
- Cooper, Donald R and Schindler, Pamela S. 2009. *Business Research Methods Tenth edition*. McGraw-Hill International Edition.
- Efferin, S., Darmadji, S.H and Tan, Y. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.

- Giligan, Thomas W and Matsusaka, John G. 2001. *Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century*. National Tax journal. Vol. 54: 5782.
- Greiling, Dorothea. 2005. *Performance measurement in the public sector: the German experience*. Emerald Research, Vol. 54: 551-567.
- Hadi, Abdul, Hendri, Supto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Hamzah, Ardi 2007, *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*, Konferensi Penelitian, Jatim
- Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat*. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta. Erlangga.
- Mulyono, Imam. 2009. *Faktor-faktor pinjaman daerah*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Naim, A., dan F. Rakhman. 2000. *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.15: 70-82.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Yudistisia.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

- Sadjiarto, Adjie. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 2, Nopember 2000: 138–150.
- Schmalensee, R. 1989. *Intra-Industry profitability differences in US manufacturing*. Journal of Industrial Economics Vol 37: 337-357.
- Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities*. Journal Public Policy January 2010
- Susanti, Asri Diah. 2010. *Demand Supply dan Praktik Social Disclosure di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasi.
- Winarna, J and Murni, S. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Wood, L. 1998. *Local Government Dollars & Sense* (Rancho Palos Verdes, CA.: Training